

## ABSTRAK

*Jakarta mengalami permasalahan rumit sebagaimana halnya dialami kota-kota besar lainnya di dunia. Harus diakui betapa sulit menyediakan kebutuhan akan ruang untuk menunjang fungsi kota metropolitan sebagai pusat kegiatan pemerintahan selain sebagai pusat perekonomian, perdagangan dan jasa. Banyak perusahaan multinasional turut mengembangkan usahanya dan bersaing dengan perusahaan lokal. Kebutuhan ruang untuk pembangunan gedung-gedung perkantoran, unit-unit hunian dan fasilitas lainnya memerlukan lahan yang cukup besar*

*Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah Lembaga Pemerintah yang dibentuk untuk mengatur proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD. Proses pengadaan di lingkungan pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, Lembaga tersebut diperlukan untuk perencanaan, pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi.*

**Keyword :** lembaga kebijakan barang dan jasa, kantor pemerintahan

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA